

## **ABSTRAK**

Praktik pembuatan Covernote oleh Notaris dalam hubungan hukum keperdataan terus berkembang sebagai instrumen administratif, khususnya dalam proses pencairan kredit ketika dokumen jaminan belum sepenuhnya selesai. Namun, keberadaan Covernote menimbulkan permasalahan karena tidak diatur dalam UUJN, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai kedudukan, batas tanggung jawab dan akibat hukumnya. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kekosongan hukum Covernote dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi Notaris.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, UUJN; sekunder, buku, jurnal, tesis dan ceramah serta tersier, kamus dan media elektronik. Kemudian menggunakan analisis yang disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan Covernote sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada Notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covernote menjadi urgensi untuk diatur dalam peraturan perundang undangan dikarenakan telah terjadi kekosongan hukum. Karena tidak terdapat pengaturan maka Covernote tidak memiliki bentuk yang seragam, mekanisme pembagian tanggung jawab serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dalam rangka mendorong kepastian dan perlindungan hukum, Covernote yang harus dikeluarkan oleh Notaris paling tidak mencakup tiga tahapan (pra, isi dan pasca) pembuatan Covernote dan juga disertai mekanisme sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris.

***Kata Kunci: Covernote, Notaris, Perlindungan, Kepastian***

## **ABSTRACT**

*The practice of issuing Covernote by Notary in civil legal relationships continues to evolve as administrative instrument, particularly in the loan disbursement process when collateral documents have not yet been fully finalized. However, existence of Covernote raises issues because they are not regulated in UUJN, thereby potentially leading to multiple interpretations regarding their status, scope liability, and legal consequences. This research is important to address legal vacuum surrounding Covernote in order to provide certainty and protection for Notary.*

*This study employs a normative legal methodology using statutory approach and a conceptual approach, through literature review of primary legal sources UUJN; secondary sources, books, journals, theses and lectures; and tertiary sources, dictionaries and electronic media. It then employs descriptive-analytical analysis to provide overview Covernote framework as effort to provide legal certainty and protection Notary.*

*The research findings indicate that Covernote requires urgent regulation due to legal vacuum. In absence regulations, Covernote lacks a standardized format, mechanisms for allocating responsibility, and penalties for violations. To promote legal certainty and protection, Covernotes issued by Notary must at least cover three stages (pre, content and post) Covernote creation and be accompanied by mechanism for sanctions imposed on Notary.*

**Keywords: Covernote, Notary, Protection, Certainty**